

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Todaro dan Smith (2015), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Dalam konteks regional, pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Teori pertumbuhan ekonomi berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari teori klasik, neoklasik, hingga teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan Adam Smith dalam bukunya "The Wealth of Nations" (1776) menekankan pentingnya akumulasi modal, pembagian kerja, dan perluasan pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Smith berpendapat pertumbuhan ekonomi terjadi melalui proses akumulasi modal yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui spesialisasi dan pembagian kerja. Konsep "*invisible hand*" yang dikemukakan menjelaskan bahwa mekanisme pasar bebas akan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Smith menekankan pentingnya perluasan pasar, karena pasar yang lebih luas memungkinkan spesialisasi yang lebih besar dan efisiensi produksi yang lebih tinggi.

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan (1956), merupakan perkembangan penting dalam pemikiran ekonomi tentang pertumbuhan. Model Solow-Swan, menekankan peran akumulasi modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Model ini menunjukkan dalam jangka panjang,

pertumbuhan ekonomi per kapita ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi, bukan tingkat tabungan atau pertumbuhan populasi. Solow memperkenalkan konsep "*steady state*" dimana perekonomian mencapai keseimbangan jangka panjang ketika investasi per kapita sama dengan depresiasi dan pertumbuhan penduduk. Model tersebut memperkenalkan konsep produktivitas faktor total *Total Factor Productivity* (TFP) mengukur kontribusi kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, akumulasi modal memiliki diminishing returns, bahwa peningkatan modal per pekerja akan menghasilkan peningkatan output semakin menurun. Oleh karena itu, pertumbuhan jangka panjang dapat dicapai melalui kemajuan teknologi dan meningkatkan produktivitas. Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas pada akhir 1980-an merupakan kritik model Solow yang menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen. Teori pertumbuhan endogen menekankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh faktor endogen seperti investasi modal manusia, inovasi, penelitian dan pengembangan (R&D), serta akumulasi pengetahuan. Romer berpendapat bahwa pengetahuan dan inovasi teknologi memiliki eksternalitas positif, bahwa penggunaan pengetahuan oleh satu pihak tidak mengurangi ketersediaannya bagi pihak lain. Dalam model tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut tanpa batas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Lucas menekankan pentingnya *human capital accumulation* dan *learning by doing* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga menciptakan eksternalitas positif bagi perekonomian secara keseluruhan melalui *spillover effects*.

Implikasi dari berbagai teori pertumbuhan ekonomi ini sangat penting dalam konteks kebijakan pembangunan regional. Teori klasik menunjukkan pentingnya investasi dan akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Teori neoklasik mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat modal pekerja rendah tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah dengan tingkat modal yang tinggi (konvergensi), asalkan memiliki tingkat teknologi yang sama. Sementara itu, teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya investasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta inovasi untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi pembuat kebijakan di daerah, pemahaman tentang teori ini penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif, yang tidak hanya berfokus pada akumulasi modal fisik tetapi juga pada pengembangan modal manusia dan inovasi teknologi.

2.1.2 Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi menjadi perdebatan panjang dalam ilmu ekonomi pembangunan. Berbagai pandangan telah dikemukakan, mulai dari yang pesimistis hingga optimistis mengenai dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori klasik dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam "*An Essay on the Principle of Population*" (1798) berpandangan pesimistis bahwa pertumbuhan penduduk melebihi pertumbuhan produksi pangan karena penduduk tumbuh secara geometris sementara produksi pangan tumbuh secara aritmatik. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan kelangkaan sumber daya, khususnya pangan, yang pada akhirnya akan menurunkan standar hidup masyarakat dan menyebabkan "*Malthusian trap*" dimana masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Pandangan Malthus dipengaruhi oleh kondisi pada masa itu, dimana teknologi pertanian sangat terbatas dan kemampuan meningkatkan produksi pangan relatif rendah.

Namun pandangan pesimistis Malthus kemudian ditentang oleh berbagai ekonom yang berpandangan lebih optimistis. Ester Boserup (1965) dalam bukunya "*The Conditions of Agricultural Growth*" mengajukan teori yang berlawanan dengan Malthus. Boserup berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk justru mendorong inovasi teknologi dan intensifikasi pertanian. Menurut Boserup, tekanan penduduk akan memaksa masyarakat untuk mengembangkan teknologi baru dan metode produksi yang lebih efisien. Dengan kata lain, "*necessity is the mother of invention*" - kebutuhan akan mendorong inovasi. Pandangan ini didukung oleh fakta historis bahwa banyak negara berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan melalui revolusi hijau dan kemajuan teknologi pertanian, meskipun mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Dalam konteks modern, pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama

adalah kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Konsep "*demographic dividend*" atau bonus demografi menjelaskan bahwa negara dengan struktur usia penduduk yang menguntungkan (rasio ketergantungan yang rendah) dapat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi jika mampu memanfaatkan angkatan kerja produktif secara optimal. Kedua, tingkat penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk berdampak positif jika perekonomian mampu menyediakan lapangan kerja cukup untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Jika tidak, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Ketiga, kapasitas infrastruktur dan sumber daya. Pertumbuhan penduduk memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Tanpa investasi infrastruktur yang memadai, pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan *overcrowding*, penurunan kualitas layanan publik, dan degradasi lingkungan.

Penelitian empiris menunjukkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi bersifat non-linear dan sangat kontekstual. Bloom dkk (2003), dalam penelitian tentang *demographic dividend* menemukan bahwa negara Asia Timur berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan ekonomi yang kondusif. Sementara itu, beberapa negara di Afrika mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi justru menghadapi tantangan ekonomi yang serius karena kurangnya investasi dalam modal manusia dan lemahnya institusi ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bukan pertumbuhan penduduk itu sendiri yang menentukan pertumbuhan ekonomi, melainkan cara suatu negara atau wilayah mengelola dan memanfaatkan pertumbuhan penduduk. Dalam konteks Jawa Timur, dengan tingkat pendidikan dan kesehatan relatif baik serta sektor industri berkembang, pertumbuhan penduduk yang moderat dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja produktif dan perluasan pasar domestik.

2.1.3 Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan paling fundamental dan kompleks. Secara konseptual, kemiskinan didefinisikan berbagai perspektif. Menurut World Bank, kemiskinan dapat diukur dari aspek pendapatan maupun non-pendapatan seperti akses terhadap layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi dimana seseorang hidup dengan pendapatan kurang dari \$2.15 per hari (berdasarkan *purchasing power parity*/PPP 2017). Sementara itu, Badan Pusat Statistik Indonesia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang mencakup makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan di Indonesia dihitung berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dan kebutuhan non-pangan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Amartya Sen pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998, mengembangkan konsep kemiskinan yang lebih luas melalui pendekatan kapabilitas (*capability approach*). Menurut Sen (1999), kemiskinan bukan hanya rendahnya pendapatan, tetapi lebih fundamental tentang ketidakmampuan seseorang mencapai *functionings* berharga dan memiliki kebebasan memilih kehidupan yang mereka nilai. Kemiskinan dalam perspektif Sen adalah keterbatasan kemampuan seseorang mencapai kehidupan layak. Pendekatan tersebut menekankan pembangunan dilihat sebagai proses perluasan kebebasan substantif yang dimiliki masyarakat, bukan hanya sebagai peningkatan pendapatan. Konsep tersebut diadopsi dalam berbagai indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kemiskinan tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga kesehatan dan pendidikan.

Hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi bersifat dua arah dan sangat kompleks. Di satu sisi, tingkat kemiskinan tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme. Pertama, masyarakat miskin memiliki daya beli yang rendah, menyebabkan permintaan agregat menurun dan menghambat pertumbuhan sektor produksi. Kedua, rendahnya investasi dalam modal manusia karena masyarakat miskin tidak mampu mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas SDM,

menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan, kemudian mempertahankan kemiskinan. Ketiga, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keempat, masyarakat miskin cenderung memiliki tabungan rendah, sehingga mengurangi akumulasi modal untuk investasi produktif.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi kemiskinan jika pertumbuhan tersebut tidak inklusif atau tidak *pro-poor*. Konsep "*trickle-down economics*" menyatakan pertumbuhan ekonomi otomatis menguntungkan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin, telah banyak dikritik karena tidak didukung bukti empiris kuat. Martin Ravallion dan Shaohua Chen (2003) tentang *pro-poor growth* menemukan efektivitas pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada pola distribusi manfaat pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan kelompok kaya atau terkonsentrasi di sektor tertentu (seperti sektor ekstraktif atau keuangan) tidak akan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang menciptakan lapangan kerja luas, meningkatkan produktivitas pertanian, mengembangkan UMKM, dan memperluas akses terhadap layanan dasar, akan jauh lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Literatur tentang *poverty trap* menjelaskan kemiskinan bersifat persisten karena adanya *multiple equilibria*. Jeffrey Sachs (2005) dalam bukunya "*The End of Poverty*" menjelaskan masyarakat atau negara dapat terjebak dalam *poverty trap* dimana tingkat pendapatan dan modal rendah menyebabkan tidak adanya saving dan investasi, kemudian mempertahankan pendapatan yang rendah. Untuk keluar dari *poverty trap*, diperlukan "*big push*" berupa investasi besar-besaran dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dalam konteks kebijakan, mengindikasikan program pengentasan berskala kecil tidak efektif untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan kronis. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan akses terhadap modal (kredit mikro), pendidikan dan pelatihan keterampilan, perbaikan kesehatan dan nutrisi, pengembangan infrastruktur, dan perlindungan sosial. Program seperti *conditional cash transfer* (CCT), dengan syarat penerima bantuan mengirim anak ke sekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, telah terbukti efektif dalam memutus

siklus kemiskinan antar generasi di berbagai negara seperti Brazil (*Bolsa Familia*) dan Meksiko (*Progreso/Oportunidades*).

2.1.4 Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengangguran merupakan salah satu indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Secara teknis, pengangguran adalah kondisi dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja (berusia 15 tahun ke atas dan sedang atau ingin bekerja) tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan pada periode waktu tertentu. *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan pengangguran sebagai semua orang dalam usia kerja yang selama periode referensi: (1) tanpa pekerjaan, (2) tersedia untuk bekerja, dan (3) sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah, yang dihitung sebagai persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja.

Pengangguran diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan penyebabnya. Pertama, pengangguran friksional (*frictional unemployment*) karena perpindahan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau seseorang yang baru pertama kali memasuki angkatan kerja memerlukan waktu mencari pekerjaan sesuai. Jenis pengangguran bersifat sementara dan dianggap normal dalam perekonomian dinamis. Kedua, pengangguran struktural (*structural unemployment*) karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, atau karena perubahan struktural dalam perekonomian seperti penurunan industri tertentu atau perubahan teknologi. Ketiga, pengangguran siklikal (*cyclical unemployment*) terjadi karena fluktuasi siklus bisnis, pengangguran meningkat saat resesi dan menurun saat ekspansi ekonomi. Keempat, pengangguran musiman (*seasonal unemployment*) karena perubahan musim yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja di sektor tertentu seperti pertanian dan pariwisata.

Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan secara sistematis oleh Hukum Okun (*Okun's Law*), dikemukakan oleh Arthur Okun (1962). Hukum Okun menyatakan terdapat hubungan negatif yang stabil antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Secara spesifik, hukum ini menyatakan setiap penurunan 1% dalam tingkat pengangguran akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sekitar 2-3%, atau sebaliknya. Koefisien dapat bervariasi antar negara dan periode waktu, tergantung struktur ekonomi dan karakteristik pasar tenaga kerja. Penelitian empiris modern menunjukkan bahwa koefisien Okun pada negara berkembang cenderung lebih tinggi dibanding negara maju, mengindikasikan bahwa pengangguran memiliki dampak yang lebih besar terhadap output di negara berkembang. Hukum Okun memiliki implikasi penting bagi kebijakan makroekonomi, untuk mengurangi pengangguran secara signifikan, suatu negara atau wilayah memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Mekanisme bagaimana pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa saluran. Pertama, pengangguran yang tinggi menunjukkan adanya pemborosan sumber daya manusia (*unutilized human resources*). Tenaga kerja seharusnya produktif dan berkontribusi dalam proses produksi menjadi tidak termanfaatkan, menyebabkan output aktual lebih rendah dari output potensial. Kesenjangan tersebut dikenal sebagai *output gap*. Kedua, menurunkan daya beli masyarakat secara agregat. Pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya menurunkan konsumsi. Penurunan konsumsi ini akan menurunkan permintaan agregat dan menghambat pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier. Ketiga, pengangguran yang tinggi dan berkepanjangan menyebabkan *depreciation of human capital* atau degradasi keterampilan. Pekerja menganggur jangka waktu lama cenderung kehilangan keterampilan dan produktivitas mereka, yang membuat mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan mengurangi produktivitas agregat ekonomi. Keempat, pengangguran menciptakan efek histeresis (*hysteresis effect*). Pengangguran yang tinggi dalam jangka pendek dapat menyebabkan peningkatan pengangguran struktural dalam jangka panjang karena demoralisasi, *loss of skills*, dan *social exclusion*.

Namun hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sederhana dan linear. Dalam beberapa kasus, dapat terjadi "*jobless growth*" dimana pertumbuhan ekonomi tidak disertai penurunan pengangguran signifikan. Fenomena tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan. Pertama, pertumbuhan ekonomi *capital-intensive* atau *technology-intensive* cenderung tidak menyerap

banyak tenaga kerja. Kedua, pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor dengan *labor elasticity* yang rendah (seperti sektor pertambangan atau keuangan) tidak menciptakan banyak lapangan kerja. Ketiga, *skill mismatch* antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan yang dibutuhkan oleh sektor yang tumbuh. Sebaliknya, dalam kasus ekonomi yang sedang berkembang pesat dengan tingkat migrasi yang tinggi, dapat terjadi fenomena dimana pengangguran meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif, yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja tetapi juga pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

2.1.5 Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi pembangunan modern. Ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara penduduk suatu negara atau wilayah. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan, berbagai indikator dikembangkan, dengan koefisien Gini rasio menjadi ukuran paling umum digunakan. Koefisien Gini, yang dikembangkan oleh statistikawan Italia Corrado Gini pada tahun 1912, memiliki nilai antara 0 hingga 1 (atau 0 hingga 100 jika dinyatakan dalam persentase). Nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna merata (*perfect equality*), dimana setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (*perfect inequality*) dimana seluruh pendapatan dikuasai satu orang atau kelompok, sementara yang lain tidak memiliki pendapatan sama sekali. Dalam praktiknya, koefisien Gini untuk sebagian besar negara berkisar antara 0.25 hingga 0.60. Negara dengan ketimpangan rendah seperti Skandinavia memiliki koefisien Gini sekitar 0.25-0.30, sementara negara dengan ketimpangan tinggi seperti beberapa negara Amerika Latin dan Afrika Selatan memiliki koefisien Gini di atas 0.50.

Selain koefisien Gini, terdapat beberapa ukuran ketimpangan lainnya yang penting. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi pendapatan grafis dengan memplotkan persentase kumulatif pendapatan terhadap persentase kumulatif populasi. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (*line of perfect equality*), semakin tinggi ketimpangan. Rasio Palma membandingkan share pendapatan 10%

terkaya dengan 40% termiskin, yang menurut beberapa ekonom lebih sensitif terhadap perubahan di ujung-ujung distribusi dibandingkan Gini. Rasio desil atau kuintil membandingkan pendapatan kelompok pendapatan tertentu, misalnya rasio pendapatan 20% teratas dengan 20% terbawah. Indeks Theil dan Atkinson Index juga digunakan dalam penelitian akademis karena memiliki sifat decomposability yang memungkinkan analisis ketimpangan antar kelompok dan dalam kelompok. Pemahaman tentang berbagai ukuran ketimpangan ini penting karena masing-masing memberikan perspektif yang berbeda tentang distribusi pendapatan dan dapat memberikan insight yang berbeda untuk kebijakan.

Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi topik perdebatan intensif dalam ekonomi pembangunan. Simon Kuznets (1955) dalam pidato presidennya di *American Economic Association* mengajukan hipotesis yang kemudian dikenal sebagai *Kuznets Curve* atau *Inverted-U Hypothesis*. Kuznets berpendapat bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor modern yang hanya melibatkan sebagian kecil populasi, sementara sebagian besar masih berada di sektor tradisional dengan produktivitas rendah. Namun, setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu (*turning point*), ketimpangan akan menurun seiring dengan semakin meratanya distribusi pendapatan karena semakin banyak pekerja yang berpindah ke sektor modern dan adanya redistribusi melalui kebijakan fiskal. Secara grafis, hubungan ini membentuk kurva U terbalik. Hipotesis Kuznets didasarkan pada pengamatan terhadap pola pembangunan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Namun, validitas Kuznets Curve telah banyak diperdebatkan dan dikritik dalam penelitian kontemporer. Banyak negara tidak mengikuti pola Kuznets Curve, dan bukti empiris memberikan hasil yang *mixed*. Thomas Piketty (2014) dalam bukunya "*Capital in the Twenty-First Century*" menggunakan data historis jangka panjang untuk menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan di negara maju pada pertengahan abad ke-20 lebih disebabkan oleh faktor khusus seperti Perang Dunia dan kebijakan redistributif yang agresif, bukan karena proses otomatis dari pembangunan ekonomi. Piketty juga menunjukkan bahwa ketimpangan di banyak

negara maju kembali meningkat sejak tahun 1980-an, mengindikasikan bahwa tidak ada mekanisme otomatis yang menjamin penurunan ketimpangan seiring dengan peningkatan pendapatan. Penelitian lintas negara oleh Deininger dan Squire (1998) dan Dollar dan Kraay (2002) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan dan ketimpangan, dan bahwa kebijakan dan institusi memainkan peran yang jauh lebih penting dalam menentukan tingkat ketimpangan.

Penelitian modern menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme. Pertama, ketimpangan yang tinggi menurunkan investasi dalam modal manusia. Masyarakat miskin yang menghadapi *credit constraints* tidak mampu mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, menyebabkan *underinvestment in human capital*. Hal ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan tetapi juga mengurangi produktivitas agregat ekonomi. Penelitian oleh Galor dan Zeira (1993) menunjukkan bahwa dalam presence of imperfect credit markets, initial distribution of wealth memiliki dampak permanen terhadap distribusi pendapatan dan tingkat output. Kedua, ketimpangan yang tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik yang menghambat investasi domestik dan asing. Berg dan Ostry (2011) dari IMF menemukan bahwa negara dengan ketimpangan yang lebih rendah cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih *sustainable*. Ketiga, ketimpangan yang tinggi menurunkan permintaan agregat karena masyarakat kaya memiliki *marginal propensity to consume* yang lebih rendah dibandingkan masyarakat miskin. Dengan kata lain, transfer \$1000 dari orang kaya ke orang miskin akan meningkatkan konsumsi agregat karena orang miskin cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatan tambahan mereka, sementara orang kaya cenderung menabung. Keempat, ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan *rent-seeking behavior* dan mengarah pada kebijakan yang distortif. Elite ekonomi dapat menggunakan pengaruh politik mereka untuk memperoleh *privilege* dan *protection* yang menguntungkan mereka tetapi merugikan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Kelima, ketimpangan yang ekstrem dapat mengurangi *social cohesion* dan *trust*, yang merupakan social capital penting untuk transaksi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

1. Penelitian oleh Sutikno dan Maryunani (2019) tentang "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur". Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian oleh Prasetyanto (2020) tentang "Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan pendapatan diukur dengan Gini Rasio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Penelitian oleh Tambunan (2021) tentang "Analisis Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Wilayah dengan ketimpangan pendapatan tinggi cenderung mengalami pertumbuhan yang perdagangan.
4. Penelitian oleh Wicaksono dan Amir (2022) tentang "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur". Hasil penelitian menunjukkan investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. H1: Pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur periode 2011-2024.
2. H2: Tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur periode 2011-2024.

3. H3: Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur periode 2011-2024.

4. H4: Gini Rasio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur periode 2011-2024.

2.4 Kerangka Penelitian

